

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengawasan

2. 1. 1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Nurmayani, 2009: 81). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian, 1980: 135).

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujamto, 1983: 17). Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soekarno K. yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana (Nurmayani, 2009: 82). Hal ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko yang menyatakan bahwa

pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai (T. Hani Handoko, 1984: 354).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, peneliti sepaham dengan pengertian pengawasan yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian karena pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Berdasarkan ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Apabila ditinjau dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang

sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara itu, apabila ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan terjadinya kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

2. 1. 2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan (Nurmayani, 2009: 82).

Hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana, sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan (dalam Nurmayani, 2009: 82).

2. 1. 3 Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud sebagai berikut:

- a. mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada sasaran;
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula;
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya.

Menurut Sujamto, pengawasan diadakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto, 1986: 115). Suatu pengawasan yang dilakukan oleh suatu pimpinan dari suatu lingkungan kerja tertentu mempunyai tujuan yang diharapkan tercapai. Soekarno K. mengungkapkan beberapa hal pokok mengenai tujuan pengawasan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien;
- e. Untuk mengetahui jalan keluar, jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan ke arah perbaikan (Soekarno, 1989: 146).

2. 1. 4 Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis apabila ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya

Pengawasan apabila ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- a) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- b) Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya;

- c) Surat pengaduan dari masyarakat;
- d) Berita atau artikel dari media massa;
- e) Dokumen-dokumen lainnya.

Pengawasan tidak langsung selain dilakukan melalui laporan tertulis tersebut di atas, juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan.

2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang diawasi.

Pengawasan apabila ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang diawasi dibagi atas pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

a. Pengawasan intern.

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing.

b. Pengawasan ekstern.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.

3. Pengawasan ditinjau dari segi kewenangan

Pengawasan ditinjau dari segi kewenangan terdiri atas pengawasan formal dan pengawasan informal.

a. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern.

Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

b. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (*social control*) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

4. Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan

Pengawasan yang ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan dibagi atas pengawasan preventif dan pengawasan respresif.

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.

b. Pengawasan refresif

Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini diketahui melalui audit dengan

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

2. 2 Pembinaan

2. 2. 1 Pengertian Pembinaan

Pengertian pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: 1. proses, cara, perbuatan membina (negara dsb); 2. pembaharuan; penyempurnaan; 3. usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Widjaja (1988) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, yang diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Menurut Miftah Thoha, pembinaan adalah tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik (Miftah Thoha, 2008: 207). Ada dua unsur dalam pengertian ini, pertama yaitu pembinaan itu dapat berupa suatu tindakan, proses dan pernyataan tujuan dan kedua yaitu pembinaan dapat menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.

Dari beberapa definisi pembinaan di atas, pembinaan bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, ciri-ciri pembinaan menurut Mappa (1984: 24) adalah:

- a. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
- b. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
- c. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.
- d. Pembinaan diartikan sebagai usaha untuk menata kondisi yang pantas.

2. 2. 2 Pembinaan Organisasi

Istilah pembinaan organisasi menunjukkan kepada sesuatu mengenai organisasi dan cara-cara membinanya. Pembinaan organisasi adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana di dalam proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku (Miftah Thoha, 2008: 209).

Pembinaan organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melaksanakan proses perubahan yang terencana. Pembinaan organisasi tidak hanya sesuatu hal yang dikerjakan untuk pencapaian keadaan organisasi yang

lebih baik, melainkan merupakan suatu jenis proses perubahan yang khusus dirancang untuk menghasilkan suatu hasil yang khusus pula.

2. 3 Industri

2. 3. 1 Pengertian Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Dewasa ini, istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan (<http://id.shvoong.com/economics/2143292-pengertian-industri> diakses tanggal 15 Desember 2011, pukul 9. 30 WIB).

Kegiatan industri sebenarnya sudah lama ada, yaitu sejak manusia berada di muka bumi ribuan tahun yang lalu dalam tingkat yang sangat sederhana. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, kegiatan industri pun tumbuh dan berkembang semakin kompleks.

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri dalam pengertian yang lebih luas adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Pengertian industri adalah suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi dan atau barang setengah jadi.

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Dari pengertian diatas dan perkembangan industri saat ini terlihat bahwa industri hanya menekankan pada kegiatan pengolahan saja, padahal kegiatan industri tidak hanya kegiatan mengolah, namun kegiatan yang terkait langsung dengan produktivitas dan komersial. Dengan kata lain, industri tidak terlepas dari aspek untung-rugi yang tentunya terkait pula dengan pengelolaan yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas.

2. 3. 2 Klasifikasi Industri

Industri dapat Pengklasifikasian kegiatan industri berbeda antara satu negara dengan Negara lain tergantung dari tingkat kemajuan industrinya. Negara maju merupakan negara dengan klasifikasi yang lebih beragam dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya suatu negara yang telah maju di bidang industri.

Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah sebagai berikut.

a. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan dan industri hasil kehutanan.
2. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan dan industri kain.
3. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tersier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan dan pariwisata.

b. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya, misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu dan industri makanan ringan.
2. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara, misalnya: industri genteng, industri batu bata dan industri pengolahan rotan.

3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu, misalnya: industri konveksi, industri bordir dan industri keramik.

4. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*), misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja dan industri pesawat terbang.

c. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung, misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.

2. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan, misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja dan industri tekstil.

3. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau

membantu kebutuhan masyarakat, misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan dan industri pariwisata.

d. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah

Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian, misalnya: industri minyak goreng, industri gula, industri kopi, industri teh dan industri makanan.

2. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan, misalnya: industri semen, industri baja, industri BBM (bahan bakar minyak bumi) dan industri serat sintetis.

3. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan, misalnya: industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni dan hiburan.

e. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri berorientasi pada pasar (*market oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.

2. Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.

3. Industri berorientasi pada pengolahan (*supply oriented industry*), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan, misalnya: industri semen di Palimanan Cirebon, industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak) dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).
4. Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku, misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut dan industri gula berdekatan lahan tebu.
5. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industry*), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan dimana saja, misalnya: industri elektronik, industri otomotif dan industri transportasi.

f. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain, misalnya: industri kayu lapis, industri alumunium, industri pemintalan dan industri baja.
2. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen, misalnya: industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif dan industri meubeler.

g. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya, misalnya: industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan.
2. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi, misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman.

h. Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan

Berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri), misalnya: industri kerajinan, industri pariwisata, industri makanan dan minuman.
2. Industri dengan penanaman modal asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing, misalnya: industri komunikasi, industri perminyakan dan industri pertambangan.
3. Industri dengan modal patungan (*join venture*), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara PMDN dan PMA, misalnya: industri otomotif, industri transportasi dan industri kertas.

i. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya: industri meubeler, industri makanan ringan dan industri kerajinan.

2. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan dan industri transportasi.

j. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal), misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

2. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional), misalnya: industri bordir, industri sepatu dan industri mainan anak-anak.

3. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri, yaitu modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional, misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi dan industri persenjataan.

k. Klasifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Selain pengklasifikasian industri tersebut di atas, ada juga pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986

yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

1. Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi dan menerapkan teknologi maju. Adapun industri yang termasuk kelompok IKD adalah sebagai berikut:

- a) Industri kimia organik, misalnya: industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil.
- b) Industri kimia anorganik, misalnya: industri semen, industri asam sulfat dan industri kaca
- c) Industri agrokimia, misalnya: industri pupuk kimia dan industri pestisida.
- d) Industri selulosa dan karet, misalnya: industri kertas, industri pulp dan industri ban.

2. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:

- a) Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya: mesin traktor, mesin heler, dan mesin pompa.
- b) Industri alat-alat berat/konstruksi, misalnya: mesin pemecah batu, buldozer, excavator, dan motor grader.
- c) Industri mesin perkakas, misalnya: mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, dan mesin pres.
- d) Industri elektronika, misalnya: radio, televisi, dan komputer.
- e) Industri mesin listrik, misalnya: transformator tenaga dan generator.
- f) Industri keretaapi, misalnya: lokomotif dan gerbong.
- g) Industri kendaraan bermotor (otomotif), misalnya: mobil, motor, dan suku cadang kendaraan bermotor.
- h) Industri pesawat, misalnya: pesawat terbang dan helikopter.
- i) Industri logam dan produk dasar, misalnya: industri besi baja, industri aluminium, dan industri tembaga.
- j) Industri perkapalan, misalnya: pembuatan kapal dan reparasi kapal.
- k) Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya: mesin produksi, peralatan pabrik, the blower, dan konstruksi.

3. Aneka Industri (AI)

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:

- a) Industri tekstil, misalnya: benang, kain, dan pakaian jadi.
- b) Industri alat listrik dan logam, misalnya: kipas angin, lemari es dan mesin jahit, televisi dan radio.
- c) Industri kimia, misalnya: sabun, pasta gigi, sampho, tinta, plastik, obat-obatan dan pipa.
- d) Industri pangan, misalnya: minyak goreng, terigu, gula, teh, kopi, garam dan makanan kemasan.
- e) Industri bahan bangunan dan umum, misalnya: kayu gergajian, kayu lapis dan marmer.

4. Industri Kecil (IK)

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, misalnya: industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga dan perabotan dari tanah (gerabah).

5. Industri pariwisata

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa: wisata seni dan budaya (misalnya: pertunjukan seni dan budaya), wisata pendidikan (misalnya: peninggalan, arsitektur, alat-alat observasi alam dan museum geologi), wisata alam (misalnya: pemandangan alam di pantai, pegunungan, perkebunan, dan kehutanan), dan wisata kota (misalnya: melihat pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, wilayah pertokoan, restoran, hotel dan tempat hiburan).

2. 2. 3 Proses Dalam Kegiatan Industri

Pada dasarnya kegiatan industri terkait dengan 3 (tiga) tahap yaitu: *input*, proses dan *output* yang mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Tahap input adalah tahap yang terkait dengan bahan baku, modal, peralatan dan sebagainya. Proses adalah tahapan pengolahan suatu barang. Tahap output adalah tahap hasil dari proses pengolahan tersebut menjadi barang yang siap dijual. Proses ini tidak terlepas dari aspek ekonomi dan manajerial. Aspek ekonomi terkait dengan mendapatkan keuntungan dari pengolahan tersebut yang berupa produk yang akan dijual.

Keuntungan atau benefit selalu dihitung dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan diterima dari hasil penjualan produk, sedangkan pengeluaran adalah segala kegiatan dan barang yang dibiayai untuk memperlancar proses produksi tersebut. Aspek yang dibiayai adalah bahan baku, peralatan/teknologi dan pekerja, pengepakan dan promosi. Hal tersebut perlu diperhitungkan didalam proses produksi agar tidak terjadi kerugian. Aspek lain yang harus diperhitungkan adalah aspek persaingan usaha yang terkait dengan daya saing. Persaingan usaha yang semakin ketat dituntut untuk meningkatkan kualitas sekaligus mempunyai harga jual yang terjangkau. Hal ini yang menjadi persoalan dalam proses produksi didalam industri yang menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Tantangan dalam kegiatan industri berbeda dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menghubungkan antara distributor dengan pembeli. Harga barang telah ditetapkan oleh produsen, sedangkan pedagang berfungsi untuk menghubungkan penjual dan pembeli.

2. 4 Bahan Berbahaya

2. 4. 1 Pengertian Bahan Berbahaya

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-Ind/Per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri, bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi dalam bentuk tunggal dan atau campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

2. 4. 2 Penggunaan Bahan Kimia

Bahan kimia banyak digunakan dalam lingkungan kerja yang dapat dibagi dalam tiga kelompok besar (Ridwan, 1995: 35), yaitu:

1. Industri Kimia, yaitu industri yang mengolah dan menghasilkan bahan-bahan kimia, diantaranya industri pupuk, asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat, deterjen dan lain-lain. Industri kimia dapat diberi batasan sebagai industri yang ditandai dengan penggunaan proses-proses yang bertalian dengan perubahan kimiawi atau fisik dalam sifat-sifat bahan tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu zat.
2. Industri Pengguna Bahan Kimia, yaitu industri yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu proses, diantaranya industri tekstil, kulit, kertas, pelapisan listrik, pengolahan logam, obat-obatan dan lain-lain.
3. Laboratorium, yaitu tempat kegiatan untuk uji mutu, penelitian dan pengembangan serta pendidikan. Kegiatan laboratorium banyak dipunyai oleh

industri, lembaga penelitian dan pengembangan, perusahaan jasa, rumah sakit dan perguruan tinggi.

2. 4. 3 Jenis-Jenis Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-Ind/Per/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri, yaitu meliputi:

- a. Larutan Formaldehyde / Formalin (No CAS: 50-00-0);
- b. Borax (No CAS: 303-96-4);
- c. Kuning Metanil (No CAS: 587-98-4);
- d. Rodamin-B (No CAS: 81-88-9);
- e. Paraformaldehyde (No CAS: 30525-89-4);
- f. Trioksan (No CAS: 110-88-3).